

BAB 4 ANALISA

4.1. Pengungsi Irak di Amerika Serikat dalam *Abject Cosmopolitanism*

Terdapat tiga kelompok utama aktivisme pengungsi Irak yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni aktivisme reseptif, aktivisme rekonstruktif serta aktivisme konstruktif.

David Garland, dalam analisis kritisnya mengenai kultur kontrol (*culture of control*) mengemukakan bahwa pergeseran kondisi di Amerika Serikat terhadap para pengungsi Irak memperlihatkan meningkatnya kontrol sosial bukan sebagai fenomena umum, tetapi sebagai fenomena yang diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu saja.¹⁰⁴

Meskipun kecenderungan yang ada pada periode 2003-2006 di Amerika Serikat menghimbau agar tiap individu kembali ke nilai-nilai keluarga, bekerja, moralitas serta pengendalian diri namun dalam kenyataannya tren yang ada menunjukkan adanya disiplin moral yang diarahkan kepada kelompok marginal (*abject*), seperti pengangguran, pelanggar hukum, pengguna narkotik dan obat-obat terlarang, imigran dan pencari suaka.¹⁰⁵

Kultur kontrol dan penerapan-penerapan kebijakan-kebijakan eksklusif terlihat dijalankan pada saat yang bersamaan terhadap kelompok-kelompok yang termarginalisasi secara ekonomi. Penuturan akan keadaan oleh para pengungsi Irak yang melakukan aktivisme di Amerika Serikat, terutama mereka yang tiba setelah Perang Irak 2003 menunjukkan kondisi ekonomi mereka yang termarginalisasikan, dengan minimnya akses terhadap fasilitas penghidupan serta penerapan kontrol yang eksekutif terhadap keberadaan dan aktivitas mereka.¹⁰⁶

Pada saat keseluruhan dinamika ini terjadi, konstruksi terhadap rasa takut tersebar luas di masyarakat dan menjadi legitimasi utama kriminalisasi

¹⁰⁴ Michael Welch and Liza Schuster. "Detention of Asylum Seekers in the US, UK, France, Germany and Italy: A Critical View of the Globalizing Culture of Control", dalam *Criminal Justice*, Vol. 5, 2005. hlm. 331, diakses dari <http://crj.sagepub.com/cgi/content/abstract/5/4/331>, Kamis, 4 Juni 2009, pukul 20:33 WIB.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 348

¹⁰⁶ David Garland. *Culture of Control: Crime and Social Order In Contemporary Society*. (Chicago: Chicago Press, 2001). hlm. 99-100.

terhadap para pengungsi, imigran ilegal dan pencari suaka. Pemerintah Amerika Serikat dalam retorika menggunakan, memanipulasi dan mengeksploitasi kelompok ini sebagai kelompok kriminal. Praktik-praktik eksklusif serta kebijakan-kebijakan yang ada menerapkan taktik legal yang keras dan ditujukan untuk 'menarik dari peredaran' para pengungsi, imigran ilegal serta pencari suaka. Terlihat adanya tendensi untuk melakukan labeling terhadap kelompok ini serta isu mereka. Dalam kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada periode 2003-2006, yang terjadi ialah rasa takut akan kejahatan menjadi identik dengan rasa takut terhadap para pendatang tersebut (*others*). Kriminalisasi terhadap para pengungsi ini tidak hanya menempatkan mereka dalam posisi yang senantiasa dicurigai namun juga memunculkan diskursus yang menyatakan bahwa penahanan terhadap mereka, meskipun tidak mendesak, dilihat sebagai suatu hal yang wajar dan pantas.¹⁰⁷

Diskursus ini pada akhirnya menjadi penyanggah utama terhadap kebijakan-kebijakan eksklusif terhadap kelompok pendatang ini. Meskipun ada tanggung jawab etis bagi masyarakat untuk menolak praktik-praktik yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, tetapi kebijakan yang ada tetap menjadi suatu hal yang diterima pada periode 2003-2006 karena sikap yang diambil para pembuat kebijakan terhadap peristiwa 11 September 2001, Perang Irak 2003 dan terjadinya sekuritisasi isu pengungsi.

Bahkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keputusan UNHCR serta UN Refugee Convention pasal 3 masih diberlakukan, seperti kebijakan yang khusus dikenakan untuk pengungsi Irak dari Timur Tengah. Terjadi perluasan kontrol negara terhadap para pengungsi, yang bukan merupakan warga negara dan tidak memiliki akses terhadap hak-hak serta fasilitas yang umumnya diberikan kepada warga negara.

Penempatan kembali (*resettlement*) bagi para pengungsi merupakan suatu kesempatan strategis yang kerap digunakan dalam menjalankan aktivisme. Pengungsi, yang melarikan diri dan telah menjalani penempatan kembali di Inggris atas dasar kebutuhan perlindungan legal dan fisik yang mendesak bagi dirinya hanya dalam waktu beberapa tahun bisa mengirimkan informasi akan

¹⁰⁷ *Ibid.*

keadaannya yang telah mapan pasca penempatan kembali dan bahwa sanak saudara terdekatnya kini kembali ke Irak untuk membantu pemerintahan Irak pasca Saddam Hussein¹⁰⁸.

Salah satu strategi yang digunakan untuk penanganan krisis kepengungsian ialah melalui penempatan kembali. Penggunaan penempatan kembali sebagai saluran aktivisme strategis biasanya didahului dengan usaha untuk menyesuaikan diri dan mendapatkan akses terhadap fasilitas-fasilitas mendasar dan kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut bagi sesama pengungsi Irak lainnya melalui aktivisme.

Keuntungan strategis utama yang didapatkan oleh pengungsi Irak yang mendapatkan penempatan kembali ialah:¹⁰⁹

- Mendapatkan perlindungan dan solusi sementara terkait kepastian tempat tinggal bagi mereka, dan
- Memberikan keuntungan-keuntungan lainnya bagi pihak-pihak selain diri mereka melalui aktivisme.

Seperti yang dapat dilihat dari pengalaman pengungsi yang ada, keluarga pengungsi Irak yang telah ditempatkan kembali memberikan kontribusi yang penting bagi Negara dimana mereka kini tinggal serta pada saat yang sama negara asal mereka. Dalam banyak kasus, penempatan kembali pengungsi di negara ketiga telah berhasil menghasilkan dukungan yang kuat dari warga Negara ketiga tersebut untuk mengkontribusikan solusi komprehensif untuk populasi pengungsi di Negara pengungsian pertama.

Pada dasarnya, pengungsi memerlukan dua hal utama, yakni perlindungan dan solusi. Perlindungan memanglah penting namun solusi jangka panjang merupakan bentuk perlindungan yang paling ideal. Terdapat tiga solusi jangka panjang dalam krisis kepengungsian, yakni:

- Pemulangan kembali secara sukarela ke negara asal pengungsi,
- Integrasi lokal dimana tempat tinggal disediakan oleh negara tujuan pengungsi, dan

¹⁰⁸ "Strategic Use of Resettlement", Diakses dari http://www.unhcr.org/Protection_in_Africa/Docs/Resettlement.pdf, Senin, 18 Mei 2009, pukul 18:34 WIB.

¹⁰⁹ *Ibid.*

- Penempatan kembali di negara ketiga dengan kesempatan untuk menjadi warga negara di negara tujuan.

Meskipun hubungan antara ketiga solusi tersebut tidaklah hierarkis, namun, sebagian besar pengungsi mengupayakan untuk bisa pulang kembali ke negara asal mereka. Akan tetapi, disaat pemulangan kembali maupun integrasi di Negara pengungsian mereka tidak memadai, maka penempatan kembali merupakan solusi yang paling sesuai dan dalam kebanyakan kasus menjadi solusi jangka panjang karena pada akhirnya memberikan kesempatan bagi para pengungsi yang berada di sana untuk bisa melakukan aktivisme mereka.

Perlunya melakukan perluasan lingkup dan dampak positif dari penempatan kembali mendapatkan pengakuan internasional melalui *Global Consultations on International Protection* yang diinisiasikan oleh UNHCR pada tahun 2000. Tujuan utama dari konsultasi-konsultasi ini ialah untuk merevitalisasikan rejim perlindungan pengungsi dalam *UN Convention on Refugee 1951*. Hasil akhir dari konsultasi ini ialah *Agenda for Protection* yang menekankan pada pencapaian solusi jangka panjang, yang termasuk didalamnya peningkatan penggunaan strategis penempatan kembali sebagai salah satu strategi utama. Aktivisme pengungsi Irak ternyata juga melakukan hal yang serupa dengan koridor konsultasi-konsultasi NGO tersebut, yakni berupaya untuk melakukan perluasan lingkup penempatan kembali kepada kalangan luas pengungsi Irak dan pada saat yang sama menggunakannya sebagai sarana strategis aktivisme mereka.

Penempatan kembali (*resettlement*) memberikan tiga fungsi terpenting bagi aktivisme para pengungsi Irak, yakni:

- Pertama, sebagai alat untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi yang menghadapi ancaman keamanan dan perlindungan yang mendesak.
- Kedua, bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pengungsi yang terlindungi namun tidak memiliki solusi jangka panjang.
- Ketiga, penempatan kembali merupakan saluran ekspresi solidaritas transnasional yang memungkinkan negara-negara menanggung beban bersama dan dimana para pengungsi dapat turut berbagi dan

memecahkan permasalahan-permasalahan kepengungsian yang dihadapi oleh negara penerima serta komunitas pengungsi tersebut tanpa meletakkan beban yang terlalu besar terhadap negara tujuan pengungsian.

4.2. Aktivisme Reseptif dalam *Abject Cosmopolitanism*

Aktivisme reseptif merupakan bentuk aktivisme yang paling umum dilakukan oleh para pengungsi yang mengungsi dari Irak menjelang ataupun setelah Perang Irak 2003. Pelaku aktivisme reseptif umumnya adalah pengungsi Irak yang telah memiliki hubungan dan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bekerja ataupun berhadapan dengan Amerika Serikat. Sebagian besar dari pelaku aktivisme –ataupun keluarga mereka— umumnya pernah bekerja untuk pemerintah, militer, NGO maupun media Amerika Serikat sebelum pecahnya Perang Irak 2003.

Aktivisme reseptif dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: melakukan aplikasi permohonan suaka untuk pengungsi-pengungsi Irak lainnya dari dalam Amerika Serikat karena pemerintah Amerika Serikat tidak bersedia memproses aplikasi yang dilakukan langsung dari Irak, memberikan rekomendasi untuk pengungsi Irak yang memerlukannya, menyediakan jasa-jasa penerjemahan dokumen-dokumen imigrasi yang diperlukan, *fundraising* dan *resource pooling* untuk membiayai perjalanan pengungsi Irak lainnya, bantuan memahami proses imigrasi Amerika Serikat melalui telepon, upaya legal untuk menguruskan aplikasi lanjutan bagi pengungsi yang sudah masuk, pendampingan legal bagi upaya-upaya legal para pengungsi Irak, pengurusan visa medis maupun visa pelajar untuk memasukkan pengungsi Irak, aplikasi serta diseminasi informasi terkait *special immigrant visa*.

Dalam kasus-kasus utama, para pengungsi yang ada berupaya untuk memasukkan pengungsi lainnya ke Amerika Serikat, terutama para sanak saudara. Namun untuk kasus dimana proses aplikasi ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat, perjalanan tetap didanai dan pada saat mencapai perbatasan Amerika Serikat, para pengungsi ini meminta perlindungan dan menyerahkan diri secara sukarela untuk ditahan oleh aparat yang bertanggung jawab di perbatasan.

Bentuk-bentuk ini perlu dilihat sebagai suatu bentuk *civil disobedience*, yakni ketidakpatuhan sipil yang dilakukan untuk mencapai tujuan politis tertentu. Dalam aktivisme reseptif, tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan politis para pengungsi yakni untuk dapat menerima hak-hak dasar mereka dari pemerintah Amerika Serikat. Pada saat mereka ditahan oleh para aparat perbatasan secara tidak langsung pemerintah Amerika Serikat menjadi turut bertanggung jawab atas keamanan dan kehidupan mereka yang sudah berada di dalam daerah kedaulatannya.

Upaya-upaya aktivisme dilakukan dengan cara non-kekerasan (*non-violent*) dan ditujukan sebagai upaya untuk mengkritisi, merubah ataupun mem-*bypass* kebijakan-kebijakan eksklusif yang ada. Karena pengungsi memiliki kapasitas yang minim untuk mengkritisi maupun berupaya mengubah kebijakan dengan cara politis konvensional, maka alternatif aktivisme reseptif inilah yang dipilih. Meskipun berada pada kondisi dalam tahanan ataupun berstatus imigran ilegal, dan masih sangat jauh dari kondisi ideal, namun dengan cara ini pengungsi berhasil mendapatkan kembali hak-hak paling mendasar yang telah diambil dari mereka pada saat mereka berada di Irak, yakni hak untuk kehidupan yang lebih baik dan hak untuk keamanan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat menempatkan pengungsi sebagai pihak yang seakan-akan jauh dan tidak ada. Akan tetapi dengan tiba di perbatasan dan menyerahkan diri mereka, pengungsi-pengungsi ini membuat kehadirannya diketahui dan tidak dapat disangkal baik oleh pemerintah, media maupun oleh masyarakat Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan eksklusif yang ditujukan untuk memberikan kontrol eksklusif ternyata digunakan pengungsi sebagai sarana untuk mendapatkan hak-hak mendasar mereka. Kapasitas negara sebagai subyek tunggal yang menentukan masuk dan keluarnya individu pun menjadi perlu dipertanyakan dengan adanya praktik-praktik aktivisme ini.

Aktivisme reseptif kebanyakan dilakukan melalui bentuk sederhana, dan dalam kapasitas pribadi, kelompok kecil beranggotakan sampai dengan tiga orang dan yang terbesar dilakukan oleh keluarga pengungsi Irak. Hal ini bisa dipahami karena bagi para pengungsi yang melarikan diri dari Perang Irak 2003, bentuk-bentuk aktivisme yang terorganisir dan kompleks belumlah dimungkinkan.

Kesulitan ini disebabkan oleh beberapa alasan utama, yakni: Pertama, status sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara Amerika Serikat mengimplikasikan bahwa hak-hak kewarganegaraan tidak sepenuhnya diberikan kepada mereka, termasuk di dalamnya hak politik. Kedua, kebijakan-kebijakan yang diterapkan terhadap mereka juga menghalangi upaya mereka dalam melakukan aktivisme konvensional sebagai perwujudan hal politik tersebut. Ketiga, kebanyakan pengungsi yang melakukan aktivisme reseptif umumnya masih mengalami trauma psikologis, masih harus mencari penghidupan yang layak di tempat baru mereka dan juga harus menyesuaikan diri terhadap keadaan sosial mereka yang baru. Keempat, kesulitan dalam aspek bahasa mempersulit mereka untuk melakukan aktivisme secara luas. Halangan linguistik juga mempersulit mereka dalam menggunakan wadah-wadah aktivisme konvensional yang ada di Amerika Serikat, seperti NGO, maupun organisasi-organisasi lainnya yang memerlukan tingkat kefasihan berbahasa yang belum mereka miliki.

Aktivisme ini melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada harus disikapi secara langsung oleh para pengungsi, biasanya dengan menuruti kebijakan yang ada, mencari celah-celah (*loophole*) dalam kebijakan tersebut maupun secara langsung mem-*bypass* kebijakan yang ada.

Kelompok pengungsi ini melihat Amerika Serikat sebagai negara yang menjanjikan untuk memulai hidup baru mereka. Meskipun terlihat banyak keluhan terhadap Perang Irak 2003 dan kondisi kemanusiaan pasca 2003, antagonisme terhadap Amerika Serikat terlihat tidak begitu besar. Kelompok ini tidak lagi memfokuskan diri pada Perang Irak 2003, legitimasinya serta problematika peran Amerika Serikat di Irak, namun lebih memfokuskan diri pada kondisi kemanusiaan para pengungsi Irak yang sudah berhasil masuk ke Amerika Serikat serta yang berkeinginan untuk masuk ke Amerika Serikat. Aktivisme ini adalah aktivisme yang paling mendasar yang mencoba untuk menempatkan kembali para pengungsi Irak sebagai bagian dari masyarakat Amerika Serikat dengan menyediakan ataupun meningkatkan akses fasilitas-fasilitas yang paling mendasar.

Aktivisme ini diarahkan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang tidak berhasil disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap para pengungsi.

Fasilitas-fasilitas mendasar ini pada dasarnya adalah hak-hak bagi warga negara yang harus disediakan oleh negara. Akan tetapi karena sebagian besar dari para pengungsi, imigran ilegal serta pencari suaka tidaklah berstatus warga negara maka bukanlah merupakan kewajiban langsung negara untuk menyediakan hak-hak yang biasanya didapatkan warga negara ini.

Para pengungsi aktivis yang melakukan aktivisme reseptif mencoba untuk memperjuangkan hak-hak warga negara bagi para pengungsi. Kondisi politik dan demokrasi yang ada di Amerika Serikat, serta tekanan riil yang dihadapi oleh para pengungsi turut mendorong terciptanya ruang untuk melakukan aktivisme-aktivisme ini.

Dari segi otoritas, jelas bahwa otoritas untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh adalah hak tunggal dari pihak yang berdaulat, dalam hal ini ialah hak dan kewenangan dari negara, yakni pemerintah Amerika Serikat. Di sisi lain, ternyata para pengungsi juga bertindak aktif, biasanya tetap dalam koridor legal, untuk berpartisipasi sebagai subyek dalam menentukan siapa yang diterima untuk masuk oleh Amerika Serikat.

Pengumpulan sumber daya untuk pendanaan perjalanan ke Amerika Serikat dimana keluarga pengungsi kemudian menyerahkan diri untuk ditahan merupakan bagian aktivisme reseptif yang menarik. Di satu sisi, pendanaan dan panduan kepada pengungsi untuk masuk ke Amerika Serikat adalah tugas yang umumnya dilakukan oleh negara, terkadang dengan bantuan lembaga internasional seperti UNHCR. Di sisi lain, penyerahan diri secara sukarela adalah praktik kewarganegaraan politis yang kerap dilakukan oleh para aktivis di Amerika Serikat sendiri. Penyerahan diri secara sukarela dilakukan bukan sebagai wujud ketidakberdayaan para pengungsi melainkan sebagai sebuah tindakan untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sebelumnya tidak mereka dapatkan di Irak.

Dapat terlihat bahwa praktik-praktik aktivisme reseptif yang ada mencoba untuk melakukan resistensi tersendiri terhadap penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak akomodatif, seperti *USA Patriot Act*, *REAL ID Act*, *Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act*, serta kebijakan-kebijakan prosedural lainnya yang menghalangi masuknya pengungsi Irak ke Amerika Serikat.

Aktivisme reseptif yang ada menunjukkan bahwa keberadaan pengungsi merupakan bagian yang tidak terlepas dari kondisi politik domestik Amerika Serikat yang memberikan dorongan dan ruang bagi aktivisme tersebut.

4.3. Aktivisme Rekonstruktif dalam *Object Cosmopolitanism*

Aktivisme rekonstruktif merupakan bentuk aktivisme yang merupakan kelanjutan dari aktivisme yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pengungsi Irak. Kelompok pengungsi Irak yang melakukan aktivisme rekonstruktif biasanya adalah aktivis yang memperjuangkan isu tertentu sebelum mereka mengungsi keluar dari Irak. Tidak sedikit dari para pengungsi dalam kategori ini yang melakukan aktivisme mereka secara lintas batas.

Dengan terjadinya Perang Irak 2003, pergerakan masyarakat sipil di dalam Irak menjadi problematika tersendiri, terutama karena pecahnya kekerasan sektarian dan tidak menentunya kondisi yang ada. Para pelaku aktivisme rekonstruktif melihat hal ini dan mencoba untuk memperbaiki akses para warga sipil Irak yang terkena imbas dari konflik dan krisis di Irak.

Keberadaan negara melucuti para pengungsi akan hak-hak mereka, oposisi politik, kaum liberal, serta kelompok minoritas seperti Kurdi maupun Chaldo Assyrian terpaksa harus kehilangan banyak dari hak-hak mendasar mereka. Di lain pihak, runtuhnya negara kembali memberikan ruangan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk merampas hak serta mengeluarkan warga-warga Irak lain yang mereka anggap tidak 'berhak' untuk tinggal di Irak.

Aktivisme rekonstruktif merupakan respon terhadap semua praktik-praktik eksklusif yang terjadi baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh aktor non-negara. Dalam narasi yang ada terlihat adanya motif-motif kemanusiaan yang universal seperti hak untuk hidup, hak-hak perempuan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan politik, dimana keseluruhan aspek tersebut memotivasi para pengungsi untuk terus mengerjakan aktivisme mereka guna mendapatkan dan menyediakan akses terhadap fasilitas-fasilitas yang mereka anggap adalah hak setiap individu.

Meski demikian, dalam kasus tertentu hak-hak yang diperjuangkan bisa berupa kebebasan demokratis dimana sarana yang digunakan melibatkan

aktivisme strategis dengan badan-badan pemerintah, pembuat kebijakan maupun NGO.

4.4. Aktivisme Konstruktif dalam *Abject Cosmopolitanism*

Aktivisme konstruktif merupakan upaya aktivisme yang dilakukan oleh para pengungsi Irak untuk mempengaruhi persepsi publik maupun pemerintah melalui media dan jurnalisme. Aktivisme ini mengidentifikasi konstruksi dan pembentukan persepsi sebagai bagian yang integral dari perubahan kebijakan dan penerimaan terhadap mereka. Aktivisme ini menempatkan kebijakan sebagai suatu produk dari mispersepsi yang ada, sehingga untuk memperbaiki kebijakan yang ada maka persepsi itulah yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Aktivisme konstruktif dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: menulis artikel dalam media-media yang ada, membuat dokumentasi yang bertujuan mengkomunikasikan isu-isu tertentu kepada publik Amerika Serikat, menulis surat-surat pembaca kepada media-media di Timur Tengah untuk menggugah kepedulian dari negara-negara tetangga, membantu dalam penerjemahan makna di lapangan sebagai penerjemah di lembaga Amerika Serikat yang bekerja di Irak, terjun sebagai 'fixers' yakni mereka yang ditugasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam wawancara, interaksi maupun interpretasi makna oleh lembaga-lembaga resmi serta media Amerika Serikat yang bertugas di Irak, membuat film-film independen untuk mengimbangi publikasi-publikasi yang dirasa tidak benar, kontraproduktif terhadap isu pengungsi dan hanya berfokus pada sensasionalisme saja.

Dalam kasus-kasus utama, terdapat kecenderungan pengkonstruksian ancaman pengungsi di media Amerika Serikat. Dan kasus-kasus terlihat dramatisasi dari media Amerika Serikat terhadap keberadaan pengungsi sebagai palsu (*bogus*), masyarakat diberikan citra bahwa pengungsi-pengungsi Irak yang masuk ke Amerika Serikat terkadang tidak benar-benar menghadapi ancaman nyata:¹¹⁰

Government and media start with a broad public consensus that first, we must keep out as many refugee-types of foreigners as possible; second,

¹¹⁰ Stanley Cohen. *Moral Panic as Cultural Politics*, (New York:Routledge, 2002), hlm. xix

these people lie to get themselves accepted; third, that strict criteria of eligibility and therefore tests of credibility must be used. For two decades, the media and the political elites of all parties have focused attention on the notion of “genuineness”. This culture of disbelief penetrates the whole system. So ‘bogus’ refugees and asylum seeker have not really been driven from their home countries because of persecution, but are merely economic migrants, attracted to the honey pot.

Pemerintah dan media mulai dengan adanya konsensus publik yang luas, bahwa pertama-tama, kita harus menjaga orang asing jenis pengungsi sebisa mungkin; kedua, orang-orang ini berbohong supaya diri mereka dapat diterima; ketiga, kriteria eligibilitas serta uji kredibilitas yang ketat harus digunakan. Untuk dua dekade, media dan elit politik dari partai-partai berfokus pada “keaslian”. Budaya ketidakpercayaan menembus seluruh system. Jadi pengungsi “palsu” dan pencari suaka sebenarnya tidak didorong keluar dari negara mereka karena ancaman, tetapi hanyalah migrant ekonomi, yang tertarik kepada “wadah madu”.

Persepsi ancaman dari pengungsi cenderung hanya dikonstruksikan secara terpisah di dalam dan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan bukan merupakan konstruksi dari keseluruhan publik. Sebelum dideklarasikannya ‘perang melawan teror’ praktik-praktik eksklusi terhadap pengungsi dan pencari suaka sudah terjadi dan dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam Amerika Serikat. Setelah deklarasi ‘perang melawan terorisme’ praktik-praktik ini mendapatkan justifikasi yang meningkat dimana secara spesifik aparat-aparat departemen yang bersangkutan di Amerika Serikat menyatakan bahwa eksklusi dan penahanan pengungsi serta pencari suaka bermanfaat besar bagi kepentingan keamanan nasional. Aktivisme konstruktif terlihat berupaya untuk menegaskan justifikasi-justifikasi yang ada terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap pengungsi.

Narasi dan pengalaman para pengungsi menunjukkan indikasi terjadinya ‘*moral panic*’ terhadap pengungsi, khususnya terhadap mereka yang dipersepsikan sebagai Arab atau Muslim, setelah masuknya Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Amerika Serikat memiliki identitas sebagai negara migran, akan tetapi media-media di Amerika Serikat sepertinya tidak berperan signifikan

dalam menekankan hal tersebut pada isu pengungsi dan pencari suaka. Sensasionalisme media Amerika Serikat – yang berfokus pada terorisme, perang dan pengungsi Irak yang ‘berbahaya’—tetap mempengaruhi pandangan populer dan politik namun tidak memiliki dampak konstruktif kuat apabila dibandingkan dengan media-media di Inggris maupun di Irak dalam mempengaruhi pemerintahan yang berkuasa.

Meskipun demikian, media-media di Timur Tengah masih memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pengungsi ataupun mereka yang diasingkan untuk berpartisipasi. Ruang di media-media berbahasa Arab ini juga digunakan oleh para pengungsi yang memiliki keterbatasan bahasa untuk berpartisipasi langsung dalam media di Amerika Serikat.

Dalam praktik aktivisme konstruktif, isi dari publikasi-publikasi para pengungsi di Amerika Serikat, yang mengisi bahkan mendominasi beberapa media-media berbahasa Arab tertentu kemudian diterjemahkan, disadur dan dalam beberapa kasus dibeli oleh media Amerika Serikat dan dipublikasikan kembali di dalam negeri Amerika Serikat. Dalam proses penyaduran dan alih bahasa, aktivis lainnya yang berfungsi sebagai *fixers*, memastikan tidak adanya kesalahan makna yang mungkin ditangkap oleh publik.

Aktivisme konstruktif, sesuai dengan karakteristik-karakteristiknya yang ditujukan terhadap media dan pembentukan persepsi publik dilakukan terutama oleh para pengungsi yang sebelumnya memiliki pengalaman yang relevan dengan bahasa, jurnalisme dan media. Di samping itu, para pelaku aktivisme konstruktif umumnya memiliki kemampuan bahasa dan linguistik yang fasih dan melebihi kemampuan yang dimiliki pengungsi-pengungsi yang baru masuk ke Amerika Serikat dan masih mempelajari budaya dan bahasa setempat.

Kebanyakan pengungsi yang melakukan aktivisme ini umumnya telah terekspos terhadap budaya di luar Irak, pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya atau sampai tingkat tertentu sudah memiliki kontak dan berinteraksi dengan individu-individu maupun lembaga yang berasal dari Amerika Serikat.

Isu keimigrasian, pengungsi dan pencari suaka, juga merupakan arena utama dimana komunitas nasional membentuk konstruksi mereka. Batasan-batasan dari suatu komunitas imajiner yakni Amerika Serikat dibentuk oleh

kebijakan-kebijakan negara terutama yang menyangkut keimigrasian, pengungsi dan pencari suaka. Media dan diskursus merupakan arena terpenting dimana politik kultural dan formasi nasional diimajinasikan dan diatur. Sebagai negara yang didirikan oleh imigran, formasi nasional Amerika Serikat sendiri muncul dalam transisi kolonialisasi dan migrasi.

Kesulitan–kesulitan yang dihadapi para pengungsi mengakibatkan aktivisme konvensional (demonstrasi, petisi yang ditujukan kepada otoritas, orasi dan lain sebagainya) menjadi hampir mustahil untuk dipertimbangkan. Beberapa narasi yang ada juga menyatakan bahwa status kewarganegaraan dianggap sebagai langkah berikutnya dari aktivisme. Sebagian besar pengungsi yang ingin meningkatkan dampak aktivisme mereka tampaknya menaruh urgensi yang besar terhadap status kewarganegaraan mereka untuk dapat melakukan petisi dan menyampaikan keluhan formal sebagai warga negara mengenai isu-isu yang menyangkut Irak.

Aktivisme Rekonstruktif merupakan upaya aktivisme yang diarahkan terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas bagi pengungsi Irak untuk kembali ataupun bertahan di Irak serta daerah sekitarnya. Aktivisme ini meliputi upaya-upaya seperti kembali ataupun bertahan di Irak serta daerah sekitarnya. Bentuk-bentuk aktivisme ini antara lain: repatriasi sukarela untuk membangun Irak, bekerja membantu lembaga-lembaga rekonstruksi yang bekerja di Irak, membangun fasilitas kesehatan dalam kapasitas pribadi, mengikuti pelatihan dan menjadi relawan untuk diterjunkan ke Irak guna membantu proses pemerintahan sipil pasca Perang Irak 2003, membantu otoritas provisional koalisi, mendirikan institusi berbasis universitas untuk isu-isu perempuan, menyampaikan keluhan terhadap Presiden Amerika Serikat, terkait keadaan di dalam Irak dan melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk membicarakan isu rekonstruksi Irak.

Semenjak peristiwa 11 September 2001 dan Perang Irak 2003, opini publik dan diskursus politik yang terjadi di media Irak serta Timur Tengah menjadi permasalahan teoretis dan praktis yang mendesak.¹¹¹ Upaya media-media barat dalam melihat Irak kerap dipersulit dengan adanya hambatan-hambatan mendasar

¹¹¹ Marc Lynch, "Beyond the Arab Street: Iraq and the Arab Public Sphere", *Journal of Politics and Society*, Vol.31, 2003, hlm. 55-91. Diakses dari <http://pas.sagepub.com/cgi/content/abstract/31/1/55>, Kamis, 30 Oktober 2008, pukul 23:33 WIB.

dalam melihat opini publik dan diskursus yang ada di kawasan tersebut. Media-media barat melihat publik di kawasan tersebut sebagai tidak bersahabat, emosional, irasional yang lebih bisa memberikan respon terhadap penggunaan kekerasan dibandingkan argumen-argumen dalam diskursus yang rasional.¹¹²

Persepsi mendasar ini terhadap opini publik di media Arab menunjukkan banyaknya kelemahan dan mispersepsi terutama dari media Barat.¹¹³ Bagi para pengungsi Irak yang melakukan aktivisme konstruktif, persepsi mendasar Amerika Serikat tersebut dilihat mendorong Amerika Serikat untuk menolak pendekatan rasional apapun terhadap pembentukan diskursus dan opini publik Irak. Kenyataan ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan karena secara langsung berkontribusi terhadap eskalasi konflik dan rasa saling tidak percaya antara publik Irak serta Timur Tengah terhadap Amerika Serikat.¹¹⁴

Meski dari segi bentuk, entitas-entitas politik di Timur Tengah tidak dapat dikatakan demokratis, namun pergeseran struktural dalam sarana komunikasi publik dan pembentukan opini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membentuk politik pencitraan di Irak dan seluruh kawasan Timur Tengah.¹¹⁵ Media-media baru, seperti *Al-Jazeera*, koran-koran bercorak Arab dan Islam yang didistribusikan secara bebas melalui internet, penyebaran berita secara cepat melalui e-mail, mailing list, blog dan *short message system* (sms) telah memberikan warga negara Yordania, Mesir, Lebanon, dan terutama Irak, akses untuk turut mengkonstruksi opini publik tanpa harus berhadapan langsung dengan kontrol serta sensor dari negara.

Tentunya ranah publik tersebut tidak bisa menggantikan demokrasi karena belum mampu menterjemahkan persepsi yang terbentuk menjadi hasil-hasil konkrit, terutama dalam bentuk kebijakan. Namun, dalam masa konflik dan krisis Irak ini, sarana tersebut telah berhasil secara dramatis membentuk kembali dinamika diskursus politik Timur Tengah dan konsepsi politik terkait krisis Irak.

¹¹² Daniel Pipes, "A New Round of Anger and Humiliation", dalam W. Pleczynski (ed.), *Our Brave New World: Essays on the Impact of September 11*, (Stanford California: Hoover Institution Press, 2002).

¹¹³ Marc Lynch, *Loc.Cit*, hlm. 56

¹¹⁴ Ragheda Dergham, "Respecting Arab Public Opinion is the Responsibility of Governments and the Media", *Al-Hayat*, 8 Oktober 1999.

¹¹⁵ Reuel Marc Gerech, "Better to Be Feared Than Loved," dalam *The Weekly Standard* Vol.7, No.32.

Michael Hudson berargumen bahwa bentuk-bentuk media lintas batas yang dapat diakses pengungsi ini telah mulai memberikan kekuatan revolusioner di seluruh dunia Arab serta merekonstruksikan kembali isu Irak dalam budaya politik Timur Tengah.¹¹⁶

Penelitian terkait opini publik Irak menunjukkan pentingnya diskursus dalam membentuk perilaku masyarakat. Minimnya *polling* ataupun survei berkala, sebagaimana biasanya dimiliki oleh media-media di kawasan lainnya, menjadikan keterlibatan politis dalam ranah publik ini memiliki kekuatan khusus, yakni sebagai sumber informasi dan pembentuk subyektifitas terkait persepsi warga lainnya di kawasan tersebut.¹¹⁷

Aktivisme konstruktif yang dilakukan oleh para pengungsi Irak dengan masuk ke diskursus politik Timur Tengah sebelumnya telah terlihat pada tahun 1995, dimana Kanan Makiya menyatakan bahwa individu-individu mulai melangkah masuk ke kekosongan yang terjadi, menulis, mempertanyakan serta berpikir sebagaimana belum pernah dilakukan sebelumnya.¹¹⁸

Sebagaimana terlihat dari perang-perang yang terjadi sebelum 2003, trauma kolektif yang muncul dari perang tersebut, serta kegagalan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menjaga stabilitas kawasan membuka ranah diskursus untuk argumen-argumen publik, termasuk dari para pengungsi Irak.

Ruang publik (*public sphere*) itu sendiri diidentifikasi sebagai situs-situs komunikasi di dalam suatu masyarakat, dimana anggotanya membicarakan suatu permasalahan kolektif kepada pendengar yang terimajinasikan. Keterlibatan para pengungsi Irak dalam ranah publik ialah dalam pengertian argumen-argumen publik dan perdebatan publik. Analisis terhadap keterlibatan para pengungsi Irak di dalam *public sphere* tersebut sangatlah berguna untuk melihat formasi kompleks dan artikulasi dari opini publik pada kondisi yang berada di bawah tekanan negara atau bahkan tanpa perlindungan negara sama sekali, sebagaimana terjadi di Irak pasca 2003.

¹¹⁶ Michael Hudson, "Creative Destruction: Information Technology and the Political Culture Revolution in the Arab World" diakses dari <http://nmit.georgetown.edu/papers/mchudson.htm>, Kamis, 4 Juni 2009, pukul 04:30 WIB.

¹¹⁷ Marc Lynch, *Loc. Cit.*, hlm. 57

¹¹⁸ "Individuals are stepping into the resulting vacuum ... to write, question and think as they never have before" lihat Kanan Makiya, "Toleration and the New Arab Politics", *Journal of Democracy* Vol.6 (1995), hlm. 90-103.

Keterlibatan dalam aktivisme konstruktif memang tidak ditujukan untuk membawa dampak secara langsung terhadap kebijakan yang dirumuskan, tetapi keberadaan *public sphere* tetap dianggap signifikan oleh para pengungsi Irak karena memberikan dampak jangka panjang tersendiri. Aktivisme dalam mengubah persepsi masyarakat regional dan global dilihat sebagai suatu jalur riil dimana *public sphere* dapat mempengaruhi perilaku politis dan tindakan-tindakan politis.¹¹⁹

Upaya dari para pengungsi Irak untuk mengangkat isu mereka ke level transnasional di kawasan Timur Tengah bukanlah suatu hal yang baru. Dalam sistem internasional, meski dialog-dialog global serta media yang terglobalisasikan merupakan suatu perkembangan yang menarik, namun kawasan Timur Tengah telah memiliki pengalaman lebih dari puluhan tahun dalam argumentasi politik dan diskursus politik pada level transnasional.

Upaya untuk melakukan konstruksi persepsi di level yang lebih tinggi dari negara, yakni level transnasional, regional dan global, merupakan suatu konsekuensi logis dari kondisi politik domestik Irak. Pada masa damai, aktivisme konstruktif dalam *public sphere* sangatlah minim karena adanya kontrol keras dan sifat tertutup dari rezim di Irak. Pada masa pasca Perang Irak 2003, terlihat adanya upaya untuk mengkonstruksi persepsi internasional terhadap isu Irak. Bias-bias yang ada dalam memperspesikan Irak dirasa sebagai suatu hambatan yang merugikan para pengungsi dan maka dari itu dicoba untuk diperbaiki.

Intelektual yang berasal dari kawasan ini, seperti Burhan Ghalyoun dan Mohammed Abed Al-Jabiri menyatakan bahwa ada banyak kelemahan-kelemahan utama dalam diskursus politik isu Irak di Timur Tengah. Karakteristik negatif utama yang mereka kemukakan ialah adanya subversi negara terhadap diskursus rasional-kritis dengan adanya benturan-benturan konfrontasional antar ideologi serta upaya menghindar dari kriticisme mandiri (*self-criticism*).

Di sisi lain, input balik dari media lokal di kawasan ini terhadap isu Irak pun tidak dapat dikatakan berkontribusi positif. Diskursus yang ada kerap bernuansa anti-Amerika Serikat, menggunakan retorika-retorika yang menyerang nilai-nilai utama Amerika Serikat dan terlalu sering berpaku pada teori-teori

¹¹⁹ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge: MIT Press, 1996)

konspirasi. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa hal ini berasal dari konsepsi diri yang merasa ter subordinasi, terdominasi dan tersisihkan dari dunia yang terglobalisasi dan teruniversalisasikan. Rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap stagnasi politik, ekonomi serta kekacauan yang timbul dengan adanya Perang Irak 2003 juga merupakan faktor utama di belakang hal ini.

Aktivisme konstruktif berupaya untuk mendobrak dominasi praktik-praktik retorika yang bertumpu pada antagonisme terhadap Amerika Serikat, menyerang nilai-nilai utama masyarakat Amerika Serikat, melampaui keterpakuan pada antagonisme emosional semata serta pada saat yang sama berupaya untuk menumbuhkan diskursus yang sehat dan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kondisi kehidupan para pengungsi Irak. Di sisi yang lain aktivisme ini juga mencoba untuk mengubah lensa reduksionis yang dikenakan oleh Amerika Serikat dalam melihat kondisi di Irak dan krisis kepengungsian yang tengah terjadi.

Upaya melakukan aktivisme konstruktif pasca Perang Irak 2003, telah menjadikan isu Irak suatu isu utama disamping isu Palestina, persatuan Arab, minimnya demokrasi dan tuntutan untuk demokratisasi di kawasan tersebut.

Pasca 2003, dapat dikatakan bahwa tidak ada diskursus monolitik yang mendominasi media di kawasan Timur Tengah dalam membahas Irak. Dalam periode tiga tahun, isi editorial dari Al-Quds Al Arabi memunculkan 391 editorial mengenai Irak, sedangkan Al-Hayat menerbitkan sedikitnya 265. Kurang lebih 15 esai dimuat setiap bulannya, meliputi 7% dari keseluruhan isi media tersebut. Pada saat media Amerika Serikat hanya mengikuti krisis-krisis politik, media-media berbahasa Arab di kawasan ini tetap meliput Irak secara intens bahkan pada periode pasca Perang Irak 2003.¹²⁰ Analisa terhadap kecenderungan ini menunjukkan adanya proses konstruksi yang intens terkait isu Irak di kawasan ini daripada di Amerika Serikat sendiri.

Intelektual Irak yang mengungsi serta figur-figur oposisi yang dahulu diasingkan di Amerika Serikat terus menyuarakan pendapat mereka dimana karakteristik utama yang mereka miliki ialah mencoba mengubah persepsi internasional akan permasalahan Irak, mempersepsikan Irak sebagai negara yang

¹²⁰ Mark Lynch, Loc.Cit, hlm. 62

mampu membangun kembali dirinya sendiri, dan mengkonstruksikan Irak sebagai permasalahan Arab dan permasalahan internasional, bukan sebagai permasalahan satu negara saja.

Pada periode 2003-2006, para figur-figur oposisi ini kerap memperdebatkan permasalahan Irak pasca Saddam Hussain, serta sangat sering mengkritisi Saddam Hussain. Koresponden Irak untuk PBB, Ragheda Dergham menunjukkan sikap yang keras terhadap rezim di Irak, kritik tajam terhadap negara-negara Arab yang berdiam diri, dan juga mengecam manipulasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Dewan Keamanan PBB.¹²¹ Ghassan Attiyeh, juga seorang jurnalis Irak, menulis kritik terhadap para oposisi Irak. Saad al Bazzaz, seorang pengungsi Irak, menjalankan dan mempublikasikan media Al-Zaman dari Perancis.

Upaya aktivisme konstruktif juga berupaya untuk mengeskalasikan isu Irak menjadi isu regional. Dari segi media televisi satelit, peran media seperti Al-Jazeera memberikan dampak yang luar biasa karena di media ini diskursus yang ada memperlihatkan adanya kritik terhadap otoritas di Irak, namun pada saat yang sama mengkritisi peran Amerika Serikat di kawasan tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara Arab serta Amerika Serikat mengajukan keluhan mereka terhadap media ini. Akan tetapi media ini melaporkan isu Irak dari dalam, membentuk dan merekonstruksi ulang dengan memasukkan suara-suara marginal pengungsi Irak dari berbagai kalangan untuk turut serta dalam dialog langsung guna membentuk persepsi publik.

Para pengungsi Irak memanfaatkan media ini karena, media ini meliput Irak dalam porsi besar dari penyiarannya. Dengan memasukkan suara-suara para pengungsi ini, perhatian menjadi lebih terfokuskan pada penderitaan individu-individu di Irak serta mengkritisi krisis-krisis yang terjadi, termasuk krisis kepengungsian Irak. Media ini menghadirkan para pengungsi, serta para aparat perwakilan negara untuk isu-isu Irak, suatu hal yang tidak dapat dicapai oleh aktivisme para pengungsi dalam media lokal. Tekanan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap Al-Jazeera atas pemberitaan isu pengungsi yang dianggap

¹²¹ *Ibid.* hlm. 63

”terlalu timpang” mengenai Irak ternyata malah meningkatkan popularitasnya dan reputasi independensi media tersebut dalam pemberitaan isu pengungsi.

Dalam aktivisme konstruktif perlu dibedakan ruang publik politis dengan teknologi yang memungkinkannya. Teknologi seperti media cetak, media televisi satelit, sms, *mailing list*, e-mail, blog, semuanya memberikan akses terhadap diskursus politik akan tetapi ruang publik politik baru benar-benar tercipta pada saat aktor-aktor, yakni para pengungsi Irak melakukan tindakan-tindakan politik untuk mencoba menggapai para pendengar dan mengkonstruksikan kembali permasalahan Irak sebagai permasalahan politik dan permasalahan kolektif.

Pada periode 2003-2006, perkembangan teknologi mengizinkan adanya penyiaran akan tetapi tindakan-tindakan politis para pengungsi untuk terjun dan turut serta dalam debat-debat yang adalah yang membuat ’penderitaan Irak’ sebagai citra mental dominan (*dominant mental image*) yang terkonstruksikan bagi sebagian besar masyarakat kawasan Timur Tengah. Aktivisme konstruktif yang dilakukan oleh para pengungsi memiliki dampak yang paling signifikan dari semua bentuk aktivisme yang dilakukan para pengungsi. Menurut Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, mengakui dirinya lebih banyak mengikuti liputan-liputan media satelit daripada nasional dan menyatakan:¹²² *It is very sad that scenes of misery and suffering of Iraqi children, elderly persons and women which were caused by sanctions are shown on television . . . which makes it very hard to keep quiet.*

Faisal Al-Kasim, seorang pembawa acara untuk sebuah program populer di Al-Jazeera menyatakan bahwa partisipasi melalui konstruksi dalam media, para pemangku kepentingan yang ada, termasuk para pengungsi Irak melakukan tekanan politik secara tidak langsung terhadap para pembuat keputusan, tidak hanya di Irak, namun juga di seluruh kawasan Timur Tengah.¹²³

Kecenderungan bahwa para pengungsi Irak yang berada di luar Irak kerap berpartisipasi dalam argumen, debat serta diskursus terkait isu Irak juga sudah terlihat menjelang Perang Irak 2003. Dari 242 surat-surat pembaca yang dikirimkan ke Al-Quds Al-Arabi teridentifikasi bahwa 68% berasal dari

¹²² *Ibid.*, hlm. 65

¹²³ Faisal Al-Kasim, “Crossfire: The Arab Version”, *Harvard International Journal of Press Politics* Vol.4 (1999) hlm. 93-97

Amerika Serikat dan beberapa lainnya dari Eropa. Upaya melakukan deterritorialisasi isu Irak memperlihatkan dimensi baru yang unik, sebuah partisipasi jejaring diaspora yang bisa dan telah berpartisipasi dalam debat-debat politik dan diskursus menyangkut negara asal mereka. Aktivis pengungsi Irak yang bergerak sebagai oposisi dalam pengasingan adalah yang paling efektif dalam menggunakan media-media baru ini dalam aktivisme konstruktif mereka. Aspirasi para oposisi yang mengungsi ataupun diasingkan di Amerika Serikat pada periode 2003-2006, tersuarakan dengan sangat baik pada media-media regional dan internasional dibandingkan dalam media lokal di Irak.¹²⁴

Uniknya isu Irak dipergunakan untuk menyatukan tema regional, yakni kesengsaraan yang berlebihan yang melanda warga Irak. Pada periode 2003-2006, pelaporan warga sipil serta anak-anak Irak yang menderita menjadi tema umum di surat kabar-surat kabar, *website*, bahkan dalam kaset-kaset khotbah keagamaan yang disirkulasikan di kawasan tersebut.

Semenjak 2003, dukungan aktivisme konstruktif dilakukan dengan memisahkan dukungan terhadap masyarakat Irak dan bukan terhadap pemerintahan Irak.¹²⁵ Aktivisme konstruktif para pengungsi Irak yang dilakukan dalam segala keterbatasannya oleh Abd al-Wahhab Al-Affendi dinyatakan sebagai sebuah krisis jiwa Arab dimana berdiam diri bukanlah suatu pilihan.¹²⁶

Dalam upaya melakukan aktivisme konstruktif, terlihat bahwa tidak semua upaya ini adalah searah, sehingga ditemukan banyak sekali perbedaan pendapat akan karakteristik permasalahan Irak, akar masalah krisis kepengungsian serta tindakan yang harus diambil. Akan tetapi dari isu-isu dan agenda-agenda yang diusung memperlihatkan adanya narasi kolektif yang cukup koheren.¹²⁷

¹²⁴ Mark Lynch, *Loc.Cit*, hlm. 66

¹²⁵ “Don’t labor under the illusion that unleashing your media apparatus ... would get you off the hook ... the sympathy and outrage felt by the Arab street in the wake of the US-British bombings were motivated by support for the Iraqi people ... neither this anger or sympathy was meant to support you”. *Ibid.* hlm.70

¹²⁶ Dinyatakan sebagai “a crisis of the Arab soul [about which] silence is not an option”, Abd Al-Wahab Al-Affendi, “The Iraqi Tragedy and the Crisis of the Arab soul: Silence is Not an Option”, *Al-Quds Al-Arabi*, 21 Agustus 1999.

¹²⁷ Perdebatan terkait sistem politik alternative pasca-Saddam kerap muncul seperti demokrasi, federalisme serta hak-hak minoritas muncul secara rutin dari para pengungsi namun jarang didominasi oleh satu opini saja. Mark Lynch, *Loc.Cit*, hlm. 81

Keberhasilan aktivisme konstruktif mungkin adalah yang paling mencolok dari ketiga bentuk aktivisme konstruktif yang ada karena pada periode 2003-2006 hanya isu Palestina yang mengalahkan urgensi diskursus Irak.

Narasi-narasi para pengungsi akan keluarga-keluarga yang termiskinkan dan menjual barang-barang mereka untuk mengungsi, anak-anak dan bayi-bayi yang sakit dan meninggal, wabah yang meluas semuanya kerap bermunculan di media.¹²⁸



¹²⁸ Mark Lynch, *Loc. Cit.*, hlm. 77